



PROFIL KEMISKINAN DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK PROVINSI ACEH MARET 2017

JUMLAH PENDUDUK MISKIN MARET 2017 MENCAPAI 872 RIBU DENGAN NILAI
GINI RATIO SEBESAR 0,329

RINGKASAN

- Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang jumlahnya 841 ribu orang (16,43 persen).
- Selama periode September 2016-Maret 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan, di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen (dari 10,79 persen menjadi 11,11 persen), dan di daerah perdesaan mengalami peningkatan 0,57 persen (dari 18,80 persen menjadi 19,37 persen).
- Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.
- Pada periode September 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami penurunan dari 3,062 pada September 2016 menjadi 2,978 pada Maret 2017. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan dari 0,867 pada September 2016 menjadi 0,807 pada Maret 2017.
- Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,329. Angka ini menurun sebesar 0,012 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,341.
- Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,33 persen pada Maret 2017. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,08 persen, sementara untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 22,07 persen.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2017 mencapai 872,61 ribu orang (16,89 persen). Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2016, maka selama periode tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 31 ribu orang. Sementara apabila dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 24 ribu orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2016-Maret 2017 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan di daerah perkotaan sebesar 0,32 persen dan di daerah perdesaan sebesar 0,57 persen.

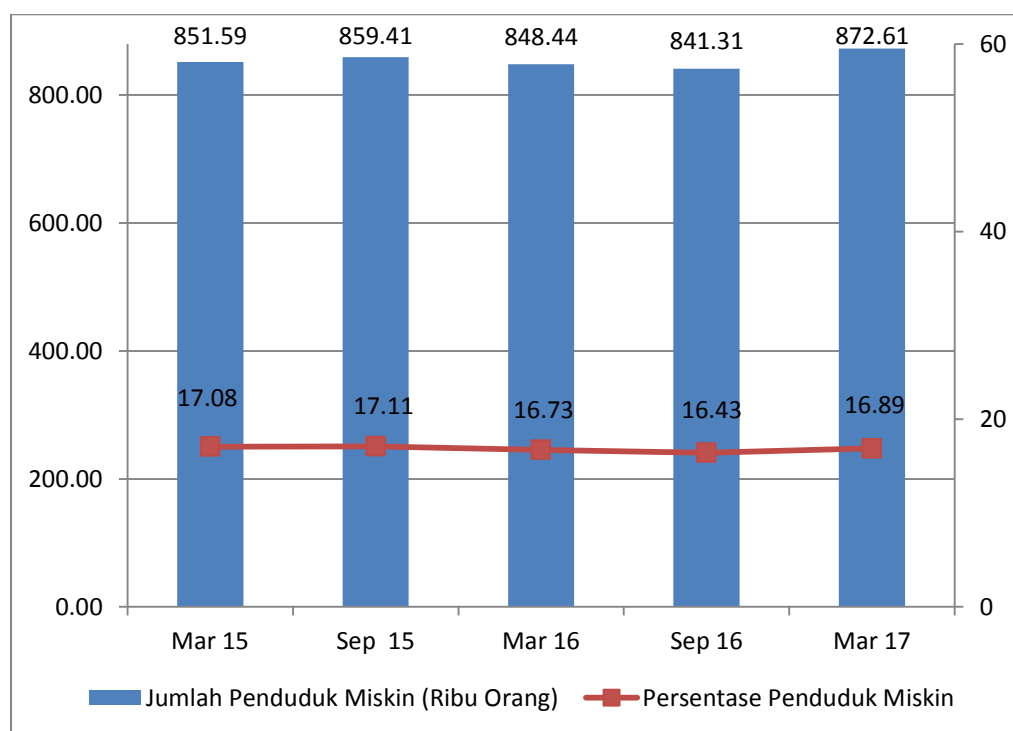
Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Menurut Daerah, 2015 - 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2015	157,57	11,13
September 2015	155,81	10,92
Maret 2016	159,50	10,82
September 2016	163,02	10,79
Maret 2017	172,35	11,11
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2015	694,01	19,44
September 2015	703,60	19,56
Maret 2016	688,94	19,11
September 2016	678,29	18,80
Maret 2017	700,26	19,37
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2015	851,59	17,08
September 2015	859,41	17,11
Maret 2016	848,44	16,73
September 2016	841,31	16,43
Maret 2017	872,61	16,89

Sumber: Susenas 2015-2017

Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2017 jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 851,59 ribu orang (17,08 persen) kemudian meningkat menjadi 859,41 ribu orang (17,11 persen) pada September 2015. Selanjutnya turun pada Maret 2016 menjadi 848,44 ribu orang (16,73 persen) dan kembali turun pada periode berikutnya mencapai 841,31 ribu orang (16,43 persen) di September 2016. Pada periode Maret 2017 terjadi peningkatan kembali menjadi 872,61 ribu orang (16,89 orang).

Gambar 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, 2015-2017



Sumber: Susenas 2015-2016

2. Perubahan Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode September 2016-Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,52 persen, yaitu dari Rp.424.765,- per kapita per bulan menjadi Rp.435.454,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,81 persen, dari Rp. 445.448,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp. 458.011,- per kapita per bulan pada Maret 2017, sedangkan untuk daerah perdesaan naik sebesar 2,38

persen yaitu dari Rp. 415.826,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp. 425.730,- per kapita per bulan pada Maret 2017.

Tabel 2.
Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh Menurut Daerah,
2015 - 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2015	293.697	116.717	410.414
September 2015	302.128	118.196	420.324
Maret 2016	306.243	121.727	427.970
September 2016	319.768	125.719	445.488
Maret 2017	330.153	127.858	458.011
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2015	297.479	84.638	382.117
September 2015	306.737	87.682	394.419
Maret 2016	315.697	88.288	403.985
September 2016	324.854	90.972	415.826
Maret 2017	331.267	94.463	425.730
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2015	296.406	93.744	390.150
September 2015	305.428	96.344	401.773
Maret 2016	312.801	98.155	410.956
September 2016	323.548	101.217	424.765
Maret 2017	330.958	104.496	435.454

Sumber: Susenas 2015-2017

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2017 sebesar 76,03 persen (72,08 persen di perkotaan dan 77,84 persen di perdesaan), sedangkan pada September 2016 sebesar 76,17 persen.

Pada Maret 2017, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 20,24 persen di perkotaan dan 26,05 persen di

perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (13,19 persen di perkotaan dan 14,28 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang (5,09 persen di perkotaan dan 3,87 persen di perdesaan).

Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, yaitu 6,76 persen di perkotaan dan 5,13 persen di perdesaan. Berikutnya yaitu bensin (3,69 persen di perkotaan dan 3,27 persen di perdesaan) dan listrik (2,54 persen di perkotaan dan 1,51 persen di perdesaan).

Tabel 3.
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) di Provinsi Aceh, Maret 2017

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	72,08		77,81
Beras	20,24	Beras	26,05
Rokok kretek filter	13,19	Rokok kretek filter	14,28
Tongkol/tuna/cakalang	5,09	Tongkol/tuna/cakalang	3,87
Telur ayam ras	3,54	Telur ayam ras	3,15
Kue basah	2,88	Kue basah	3,43
Gula pasir	2,68	Gula pasir	3,34
Cabe merah	2,03	Bandeng	2,15
Bandeng	1,77	Cabe merah	1,96
Kembung	1,73	Bawang merah	1,66
Bawang merah	1,69	Kembung	1,61
Bukan Makanan	27,92		22,19
Perumahan	6,76	Perumahan	5,13
Bensin	3,69	Bensin	3,27
Listrik	2,54	Listrik	1,51
Pendidikan	2,25	Pendidikan	1,40
Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,58	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,24
Pakaian jadi perempuan dewasa	1,53	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,20

Sumber: Susenas 2017

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,062 pada September 2016 menjadi 2,978 pada Maret 2017. Sedangkan untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan pada periode yang sama juga turun dari 0,867 menjadi 0,807. Berkurangnya nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan, sementara kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin kecil.

Tabel 4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂)
di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2015 - 2017

Daerah/Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P ₂)
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2015	2,245	0,659
September 2015	1,843	0,498
Maret 2016	2,297	0,703
September 2016	1,448	0,283
Maret 2017	1,553	0,352
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2015	3,444	0,901
September 2015	3,614	0,977
Maret 2016	3,958	1,117
September 2016	3,738	1,112
Maret 2017	3,589	1,002
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2015	3,104	0,832
September 2015	3,113	0,703
Maret 2016	3,476	0,997
September 2016	3,062	0,867
Maret 2017	2,978	0,807

Sumber: Susenas 2015-2017

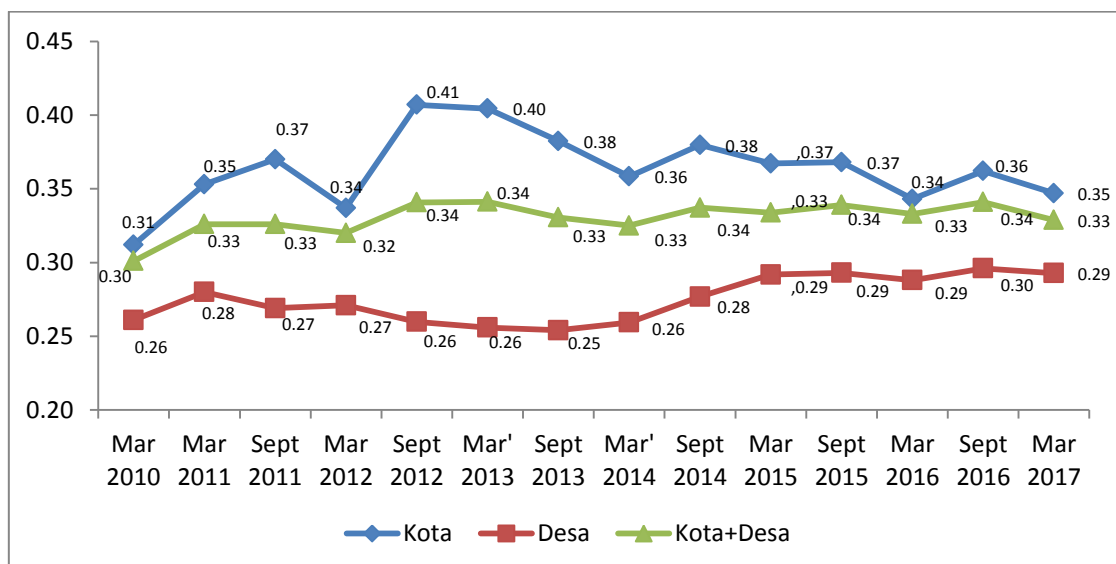
Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada periode September 2016-Maret 2017 kedua indeks tersebut mengalami peningkatan untuk daerah perkotaan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Pada periode tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan naik dari 1,448 menjadi 1,553 sedangkan di perdesaan turun dari 3,738 menjadi 3,589. Sementara itu, untuk Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama di perkotaan naik dari 0,283 menjadi 0,352 sedangkan di perdesaan turun dari 1,112 menjadi 1,002.

4. Perkembangan *Gini Ratio* di Aceh 2010 – Maret 2017

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Aceh pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,30 dan meningkat menjadi 0,33 pada Maret 2011. Hingga seterusnya sampai dengan periode Maret 2017 nilai *Gini Ratio* Aceh cenderung berfluktuasi antara angka 0,32 dan 0,34. pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,33 dan meningkat menjadi 0,34 pada September 2015. Selanjutnya *Gini Ratio* Aceh menurun pada periode Maret 2016 menjadi 0,33 tetapi meningkat menjadi 0,34 pada September 2016. Pada Maret 2017 *Gini Ratio* Aceh kembali turun menjadi 0,33.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,35. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,36. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2017 tercatat sebesar 0,29. Angka ini juga menurun dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,30.

Gambar 1
Perkembangan *Gini Ratio*, Maret 2010–Maret 2017



5. Perkembangan Distribusi Pengeluaran September 2016–Maret 2017

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,33 persen yang berarti Aceh berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2017 ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 19,44.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2017 adalah sebesar 19,08 atau tergolong ketimpangan rendah. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2017 adalah sebesar 22,07 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah juga.

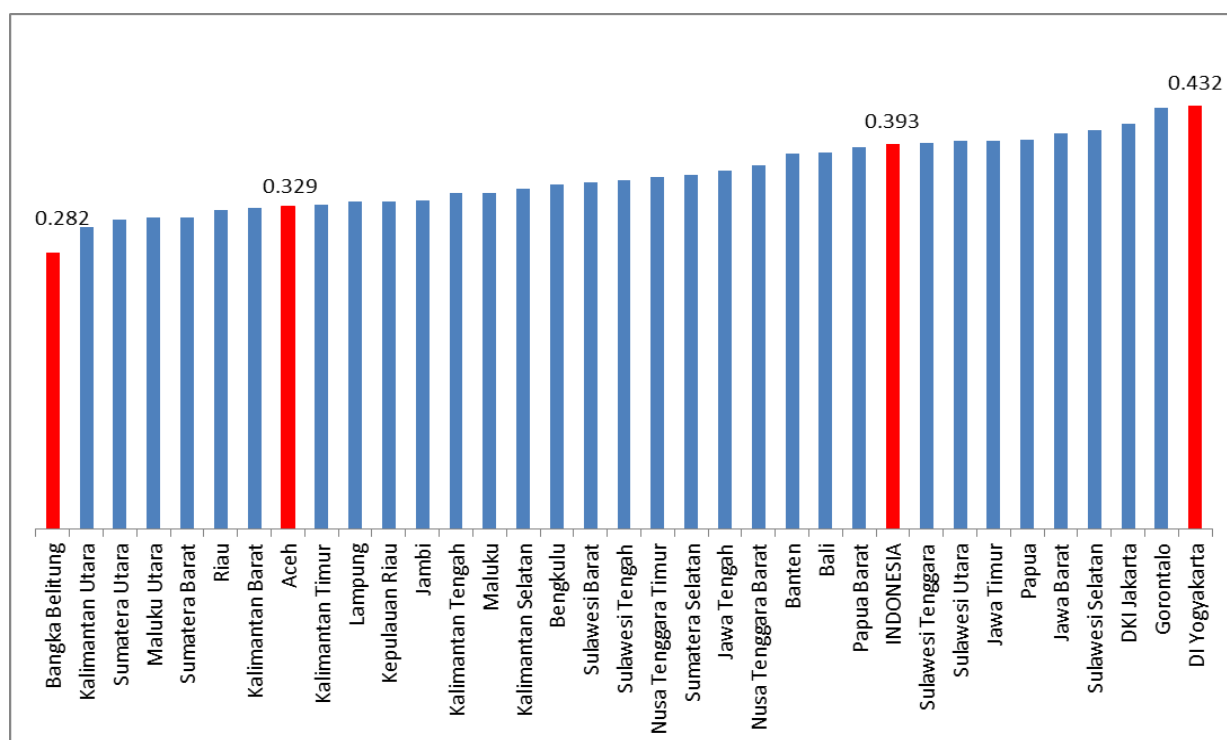
Tabel 1
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Aceh
September 2016, dan Maret 2017 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
September 2016	18,09	38,62	43,29	100
Maret 2017	19,08	38,53	42,40	100
<u>Perdesaan</u>				
September 2016	21,48	40,55	37,97	100
Maret 2017	22,07	39,69	38,24	100
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
September 2016	19,44	38,48	42,08	100
Maret 2017	20,33	38,36	41,32	100

6. Gini Ratio Menurut Provinsi pada Maret 2017

Pada Maret 2017, provinsi yang mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,432 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,282 (Gambar 3). Sedangkan Aceh berada pada urutan ke delapan terkecil dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Gambar 3
Gini Ratio menurut Provinsi Maret 2017



7. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung Head Count Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan BukanMakanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

- c. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- d. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- e. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 35 jenis komoditi di perkotaan dan 36 jenis komoditi di perdesaan.
- f. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2017 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) modul konsumsi bulan Maret 2017. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.